

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia menjadi salah satu negara berkembang dengan kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah namun hal tersebut belum menjadikan Indonesia dapat mencapai pembangunan yang merata. Hal tersebut ditandai dengan tingginya tingkat kemiskinan dan angka pengangguran yang masih tinggi dampak dari rendahnya kesempatan kerja di beberapa wilayah (Sakdiyah, 2023). Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah berupaya untuk membuka lapangan pekerjaan baru agar dapat menyerap tenaga kerja.

Adapun upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan kesempatan kerja yakni dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah bertujuan sebagai tolak ukur untuk melihat keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur dengan harapan pemerintah dapat menaikkan standar kehidupan yang lebih baik, terciptanya lapangan pekerjaan baru, terwujudnya pemerataan pendapatan di seluruh wilayah (Noviyanti, 2022). Pembangunan ekonomi menggunakan ukuran dan sejumlah indikator yang umum digunakan sebagai alat ukur. Produk Domestik Regional Bruno digunakan sebagai indikator kinerja ekonomi secara umum untuk menentukan seberapa maju suatu daerah. Indikator lain seperti tingkat pertumbuhan, pendapatan per kapita, dan perubahan struktur ekonomi juga sering digunakan.

Pembangunan di suatu daerah (baik kabupaten maupun kota) dilakukan secara berkelanjutan, dan setiap daerah berupaya untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya lain yang ada pada daerah tersebut (Fitriansyah, 2021). Pembangunan daerah berfokus pada kebijakan pembangunan yang didasarkan pada potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik daerah. Proses pembangunan seharusnya dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Sebagaimana pertumbuhan penduduk tidak lagi menjadi permasalahan bagi pembangunan ekonomi daerah, maka pertumbuhan penduduk juga harus dibarengi dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Menurut Arsyad, pertumbuhan penduduk yang tinggi dan rendahnya kinerja pembangunan sumber daya manusia dapat menghambat penciptaan lapangan kerja dan menyebabkan peningkatan pengangguran (Sari et al., 2023).

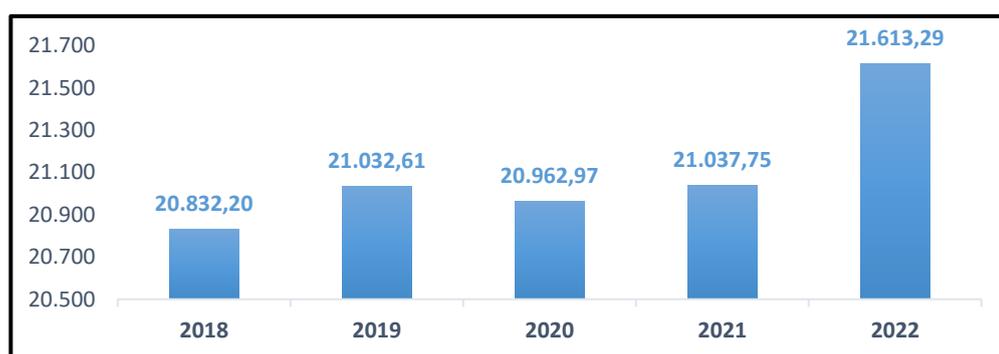
Pembangunan didorong oleh faktor peningkatan jumlah penduduk. Dalam peningkatan jumlah penduduk, diperlukan bekal berupa pendidikan sebelum memasuki dunia kerja untuk mewujudkan masyarakat yang terdidik memiliki keterampilan (kompeten) dan keahlian, maka hal tersebut dapat menjadi modal untuk melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Dengan demikian, dengan bertambahnya jumlah penduduk, diharapkan akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, bermutu dan terampil, sehingga diharapkan akan berdampak lebih besar terhadap pertumbuhan kegiatan perekonomian. Laju pertumbuhan penduduk harus dibarengi dengan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, apabila tidak dibarengi dengan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia maka hal tersebut akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi

(Izzah, 2021). Pertumbuhan penduduk yang cepat mempunyai dampak yang sama dengan pertumbuhan angkatan kerja yang pesat. Demikian pula dengan kapasitas penciptaan lapangan kerja oleh sektor ekonomi yang masih terbatas, sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran di beberapa wilayah.

Tenaga kerja merupakan bagian penting dari produksi dan pemanfaatan hasil pembangunan, sehingga tenaga kerja menjadi modal utama dalam pembangunan daerah. Pertumbuhan penduduk yang terus berlanjut dikaitkan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Ketika ketersediaan kesempatan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja, ini menunjukkan bahwa belum efektifnya pembangunan di suatu daerah (Ibrahim et al., 2021).

Menurut UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan individu maupun untuk masyarakat.

**Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Jawa Timur 2018-2022**



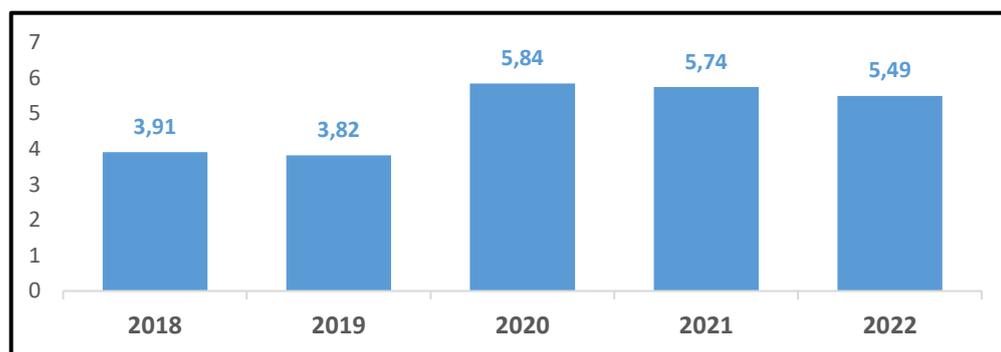
Sumber : BPS Jatim, 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu lima tahun (2018-2022) mengalami fluktuasi. Jumlah pekerja di lapangan pekerjaan utama

mengalami peningkatan pada tahun 2018-2019 sebesar 20.832.201 jiwa dan 21.032.612 jiwa. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 20.962.967 jiwa, kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 21.037.750 jiwa, dan pada tahun 2022 sebesar 21.613.293 jiwa.

Penurunan pada tahun 2020 juga disebabkan oleh pandemi COVID-19. Karena terbatasnya kegiatan produksi dan konsumsi masyarakat, maka permintaan tidak dapat berjalan secara normal seperti sebelum pandemi. Akibatnya, banyak lapangan usaha yang harus bangkrut dan ratusan bahkan ribuan karyawan harus diberhentikan. Tingkat pengangguran akan terus meningkat sebagai akibat dari pemberhentian karyawan yang dilakukan oleh perusahaan.

**Gambar 1. 2 Jumlah Pengangguran Provinsi Jawa Timur 2018 – 2022**



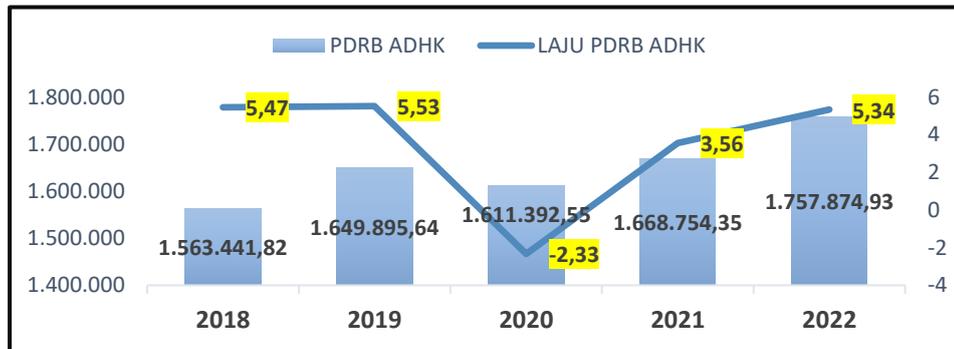
Sumber : BPS Jatim, 2023

Dapat dilihat pada gambar diatas menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 dan 2019 tingkat pengangguran Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 3,91% dan 3,82%, namun pada tahun 2020 tingkat pengangguran naik 2,02% dari 3,82% menjadi sebesar 5,84%, kemudian pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan kembali sebesar 5,74% dan 5,49%. Ketika tingkat pertumbuhan angkatan kerja tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan lapangan

kerja, maka terjadi pengangguran sehingga menimbulkan kesenjangan yang dapat berdampak negatif pada suatu daerah.

### Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur 2018 -2022

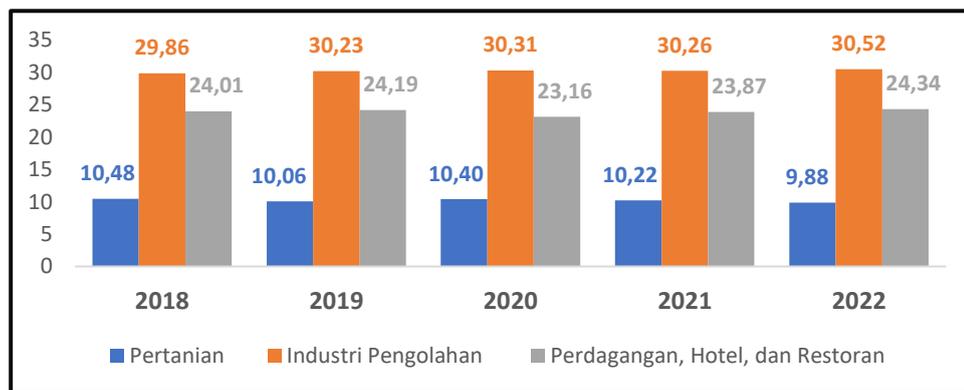
Sumber : BPS Jatim, 2023



Pada gambar diatas menunjukkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018-2022, dengan nilai total dan laju pertumbuhan PDRB ADHK mengalami fluktuasi. Nilai PDRB ADHK pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.563.441,82 milyar rupiah dengan laju PDRB sebesar 5,47%, kemudian pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.649.895,64 milyar rupiah dengan laju PDRB sebesar 5,53% (naik 0,06%). Pada tahun 2020 nilai total dan laju PDRB mengalami penurunan dengan nilai total sebesar Rp. 1.611.392,55 milyar rupiah dan laju PDRB sebesar -2,33% (turun 7,86%), namun pada tahun 2021 nilai total dan laju PDRB mengalami peningkatan dengan nilai total sebesar Rp. 1.668.754,35 milyar rupiah dan laju PDRB sebesar 3,56% (naik 5,89%), di tahun 2022 sebesar Rp. 1.757.874,93 dengan laju PDRB sebesar 5,34% (naik 1,78%). Perekonomian Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis sebagai imbas dari pandemi COVID-19 seperti yang tertera pada grafik sebesar -2,33%. Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan terendah sepanjang sejarah berdirinya Provinsi Jawa Timur, namun penurunan tersebut tidak menghambat

pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Provinsi Jawa Timur, sehingga masih terdapat beberapa sektor yang masih bisa diandalkan di Provinsi Jawa Timur.

**Gambar 1. 4 Distribusi Persentase PDRB 3 Sektor Terbesar  
Provinsi Jawa Timur**



Sumber : BPS Jatim, 2023

Dapat dilihat pada gambar diatas menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki sejumlah potensi sektor untuk dikembangkan termasuk industri pengolahan; perdagangan, hotel, dan restoran; serta pertanian. Perkembangan di setiap sektor akan meningkatkan PDRB Provinsi Jawa Timur. Dengan potensi yang dimiliki Provinsi Jawa Timur, diharapkan mampu menarik investor untuk berinvestasi di Provinsi Jawa Timur.

Dengan adanya sektor-sektor unggulan yang memberikan dampak positif pada PDRB Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu menciptakan lapangan usaha dan memberikan kesempatan kerja yang cukup sehingga mengurangi angka pengangguran di Provinsi Jawa Timur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Unggulan Perekonomian di Provinsi Jawa Timur”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana pergeseran sektor perekonomian di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah terdapat perbedaan pengaruh sektor unggulan dan non unggulan dalam menyerap tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui sektor mana saja yang menjadi sektor unggulan di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui pergeseran sektor perekonomian di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh sektor unggulan dan non unggulan dalam menyerap tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur.

## **1.4 Ruang Lingkup**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis memberikan batasan permasalahan pada penelitian ini untuk menjadi fokus penelitian sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian untuk menunjang proses penelitian agar lebih terfokus dan diperoleh hasil yang dapat memberikan manfaat yang maksimal. Pada penelitian ini, penulis memilih topik utama pembahasan meliputi sektor unggulan, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui sektor mana yang menjadi sektor unggulan dan mampu menyerap tenaga kerja secara besar guna mendorong

pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jawa Timur, dengan menggunakan data PDRB ADHK seri 2010 periode 2012-2022 Provinsi Jawa Timur dan Indonesia (Nasional). Selain itu, data penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja digunakan untuk melihat sebaran tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur menurut lapangan usaha pada tahun 2012 hingga tahun 2022.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu sekaligus menjadi sumbangsih pemikiran bagi pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengambil kebijakan ekonomi maupun ketenagakerjaan.
2. Bagi universitas, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dasar ilmu untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi pembangunan, organisasi perencanaan pembangunan daerah lembaga pusat statistik terutama terkait sektor unggulan dan ketenagakerjaan.
3. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional“Veteran” Jawa Timur dan dapat menambah wawasan tentang pembangunan ekonomi dalam pengaplikasian teori sektor unggulan dan ketenagakerjaan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan, bahan informasi, dan sumber referensi dalam meneliti dan mengkaji lebih dalam lagi untuk permasalahan yang sama khususnya yang berkaitan dengan sektor unggulan dan ketenagakerjaan.